

Peran Pemerintah Nagari dalam Pembinaan Akhlak Remaja di Nagari Ampang Pulau Kabupaten Pesisir Selatan

Hafidh Okta Deza¹, Fakhriyah Annisa Afroo²

hafidhoktadeza@gmail.com¹, fakhriyahannisa@fis.unp.ac.id²

Universitas Negeri Padang^{1,2}

ARTICLE INFO

Article history:

Received, July 22th, 2026

Revised, August 13th, 2026

Accepted, August 20th, 2026

Keywords:

Nagari Government,

Moral Development,

Adolescents,

Religious Values

Conflict of Interest:

None

Funding:

None

ABSTRACT

This study examines the role of the Nagari Government in fostering adolescents' moral development in Nagari Ampang Pulau, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency. The research was motivated by growing moral challenges among adolescents amid social and technological changes. This qualitative field study employed observation, in-depth interviews, and documentation involving six purposively selected informants, consisting of Nagari government officials, religious leaders, community leaders, and adolescents. The findings reveal that the Nagari Government functions as a facilitator, motivator, and coordinator through religious mentoring, youth activities, and community-based moral education programs. The implementation of moral development is strengthened by religious values and the Minangkabau philosophy of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Supporting factors include community participation, religious facilities, and cultural values, while social media influence, limited parental supervision, and low youth participation remain significant challenges. The study concludes that sustainable adolescent moral development requires collaboration among the Nagari Government, families, schools, and the wider community.

Corresponding Author: Fakhriyah Annisa Afroo, Department of Islamic Education, Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang, Indonesia, Email: fakhriyahannisa@fis.unp.ac.id, Phone Number: 082280912794



Copyright©2026, Author(s)

1. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan remaja. Kemudahan akses informasi melalui media digital tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan terhadap pembentukan karakter dan akhlak generasi muda (Afroo et al., 2025). Fenomena menurunnya kepedulian terhadap nilai-nilai agama, meningkatnya perilaku menyimpang, serta berkurangnya partisipasi remaja dalam kegiatan keagamaan menunjukkan bahwa pembinaan akhlak

menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Dalam perspektif Islam, akhlak merupakan inti dari pendidikan yang berfungsi membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, dan mampu menjalankan kehidupan sesuai tuntunan syariat. Oleh karena itu, pembinaan akhlak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan lembaga pendidikan, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah serta masyarakat secara kolektif.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, pembinaan akhlak memiliki posisi yang sangat strategis karena kehidupan sosial dibangun di atas falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Falsafah tersebut menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sistem pemerintahan nagari. Nagari tidak hanya berfungsi sebagai satuan pemerintahan administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan dalam membina kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah nagari memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga pada pembangunan karakter masyarakat, khususnya generasi muda (Mariana et al., 2024).

Peran pemerintah nagari dalam pembinaan masyarakat memperoleh legitimasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari yang menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan kemampuan masyarakat sesuai dengan kebutuhan nagari. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menempatkan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang menjalankan pemerintahan berdasarkan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagari memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan moral dalam membina masyarakat.

Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, termasuk membangun moral generasi muda. Kepemimpinan bukan hanya kemampuan mengelola pemerintahan, tetapi juga kemampuan membimbing masyarakat agar mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan suatu nagari tidak cukup diukur melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui keberhasilan membangun kualitas akhlak masyarakat (Aliefiarahma & Sasmita, 2025).

Pembinaan akhlak merupakan proses pendidikan yang bertujuan membentuk kebiasaan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak yang baik tidak tumbuh secara spontan, tetapi dibentuk melalui proses pendidikan, pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung. Menurut Abuddin Nata, pembinaan akhlak remaja menjadi sangat penting karena remaja berada pada fase perkembangan yang rentan

terhadap pengaruh lingkungan dan berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan akhlak memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat (Yusmardi et al., 2026).

Pembinaan akhlak remaja selama ini umumnya dilaksanakan melalui keluarga, pendidikan agama, dan berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama dalam pembentukan akhlak remaja. Peran orang tua sebagai teladan, pemberi nasihat, pembimbing, serta pembentuk kebiasaan religius memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan karakter dan perilaku moral remaja. Selain itu, pendidikan agama Islam dalam keluarga menjadi fondasi penting dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, tanggung jawab, dan akhlak mulia sejak usia dini (Ridwan, 2022). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih memfokuskan perhatian pada keluarga, lembaga pendidikan, dan tokoh agama sebagai aktor utama dalam pembinaan akhlak remaja. Kajian yang mengkaji peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah nagari, sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pembangunan sosial, keagamaan, dan pembinaan karakter masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, dalam konteks masyarakat Minangkabau yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, pemerintah nagari memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintahan dengan nilai-nilai adat dan syariat Islam (Budiman et al., 2026). Oleh karena itu, penelitian mengenai peran pemerintah nagari dalam pembinaan akhlak remaja masih memiliki ruang kebaruan yang layak untuk dikaji lebih mendalam.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Nagari Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembinaan akhlak remaja, seperti rendahnya partisipasi remaja dalam salat berjamaah, kurang optimalnya pelaksanaan ibadah Ramadan, meningkatnya pengaruh media sosial, serta munculnya berbagai bentuk penyimpangan perilaku remaja. Di sisi lain, pembangunan nagari selama ini lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dibandingkan pembangunan moral dan keagamaan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembinaan akhlak remaja masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah nagari bersama keluarga, tokoh agama, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*gap analysis*) antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji pembinaan akhlak dari perspektif pendidikan formal atau peran keluarga, sedangkan penelitian ini menempatkan pemerintah nagari sebagai aktor utama dalam pembinaan akhlak remaja melalui fungsi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk pembinaan akhlak, tetapi juga menganalisis peran pemerintah nagari sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator dalam

membangun karakter remaja berbasis falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai sinergi antara sistem pemerintahan nagari, nilai-nilai adat Minangkabau, dan pembinaan akhlak remaja sebagai satu kesatuan dalam pembangunan masyarakat. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan akhlak tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan dan keluarga, tetapi juga merupakan bagian dari fungsi pemerintahan lokal yang berorientasi pada pembangunan manusia secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah nagari dalam pembinaan akhlak remaja, mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan akhlak dalam meningkatkan implementasi nilai-nilai keberagamaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembinaan akhlak remaja di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam berbasis masyarakat sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah nagari dalam merumuskan kebijakan pembinaan generasi muda yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

A. Pemerintah Nagari

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sejak sebelum terbentuknya sistem pemerintahan modern di Indonesia. Keberadaan nagari tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat dan agama. Dalam sistem pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat, nagari memiliki kedudukan sebagai pemerintahan terendah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan nagari berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yaitu falsafah yang menempatkan syariat Islam sebagai landasan utama dalam pelaksanaan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, pemerintah nagari tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membina kehidupan sosial, budaya, moral, dan keagamaan masyarakat (Afdhal, 2014).

Menurut Hanif Nurcholis (2011), pemerintahan nagari merupakan penyelenggara pemerintahan lokal yang memperoleh kewenangan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, serta ketentuan hukum nasional. Pemerintah nagari memiliki posisi strategis karena merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga mampu mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Kedekatan tersebut menjadikan pemerintah nagari sebagai

aktor penting dalam mengintegrasikan pembangunan fisik dengan pembangunan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan nagari tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur, tetapi juga dari keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, moral, dan keagamaan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengarahkan masyarakat kepada kebaikan serta menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera. Kepemimpinan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pemerintah nagari memiliki tanggung jawab yang luas, yaitu tidak hanya menyelenggarakan administrasi pemerintahan, tetapi juga membina akhlak masyarakat melalui berbagai program pembangunan sosial dan keagamaan. Tanggung jawab tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat nagari yang religius, harmonis, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Islam (Haliza et al., 2026).

Peran pemerintah nagari dalam penelitian ini dimaknai sebagai segala bentuk tindakan, fungsi, dan tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah nagari dalam membina kehidupan masyarakat, khususnya remaja. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga melalui berbagai upaya pembinaan yang bertujuan membentuk karakter dan meningkatkan implementasi nilai-nilai keberagamaan di kalangan remaja. Pemerintah nagari memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekaligus menjadi penggerak berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang berkembang di lingkungan nagari (Siagian et al., 2023).

Sebagai fasilitator, pemerintah nagari berperan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembinaan akhlak remaja. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas ibadah, dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan, penyusunan program pembinaan remaja, serta pengalokasian anggaran yang mendukung kegiatan pembinaan moral dan keagamaan. Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter remaja.

Selain sebagai fasilitator, pemerintah nagari juga berfungsi sebagai motivator. Peran ini diwujudkan melalui pemberian arahan, pembinaan, penyuluhan keagamaan, serta dorongan kepada remaja agar aktif mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Pemerintah nagari bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat berupaya menumbuhkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi yang diberikan tidak hanya berbentuk nasihat, tetapi juga melalui pemberian penghargaan kepada remaja yang berprestasi dalam bidang keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Peran lainnya adalah sebagai koordinator, yaitu mengoordinasikan berbagai unsur masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan akhlak remaja.

Pemerintah nagari menjalin kerja sama dengan tokoh agama, lembaga adat, sekolah, keluarga, organisasi kepemudaan, serta unsur masyarakat lainnya dalam merancang dan melaksanakan program pembinaan akhlak. Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap program pembinaan dapat berjalan secara terpadu, berkesinambungan, dan saling mendukung dalam mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan tiga dimensi utama dalam menganalisis peran pemerintah nagari, yaitu peran sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator. Ketiga dimensi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator operasional yang menjadi dasar analisis data penelitian. Dimensi fasilitator diukur melalui penyediaan program pembinaan, dukungan anggaran, penyediaan sarana ibadah, dan dukungan terhadap kegiatan remaja. Dimensi motivator diukur melalui pemberian arahan, pembinaan, penyuluhan agama, dan pemberian penghargaan kepada remaja. Sementara itu, dimensi koordinator diukur melalui kerja sama pemerintah nagari dengan tokoh agama, sekolah, keluarga, organisasi pemuda, dan lembaga adat dalam melaksanakan pembinaan akhlak remaja. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan sejauh mana pemerintah nagari menjalankan fungsinya dalam membina akhlak remaja di Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Pembinaan Akhlak

Akhlak merupakan salah satu aspek fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi indikator kualitas kepribadian seseorang. Secara etimologis, kata *akhlak* berasal dari bahasa Arab *khuluq* yang berarti perangai, tabiat, atau budi pekerti. Dalam terminologi Islam, akhlak dipahami sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang sehingga melahirkan berbagai perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang melahirkan suatu perbuatan dengan mudah dan ringan. Apabila perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat dan nilai-nilai kebaikan maka disebut *akhlak mahmudah*, sedangkan apabila bertentangan dengan syariat disebut *akhlak madzmumah* (Yunahar Ilyas, 2006).

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembinaan akhlak merupakan suatu proses pendidikan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan untuk membentuk karakter Islami pada diri seseorang. Abuddin Nata (2005) menjelaskan bahwa pembinaan akhlak dilakukan melalui berbagai proses pendidikan seperti pembiasaan, keteladanan, bimbingan, pengawasan, dan pemberian motivasi sehingga nilai-nilai Islam dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan akhlak tidak hanya bertujuan membentuk individu yang memiliki pengetahuan agama, tetapi juga membangun pribadi yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam hubungan dengan Allah Swt., sesama manusia, maupun lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pembinaan akhlak menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari proses pendidikan Islam karena berorientasi pada pembentukan karakter dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

Pembinaan akhlak pada dasarnya bertujuan membentuk manusia yang memiliki kepribadian Islami serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan. Pendidikan akhlak tidak hanya menekankan penguasaan aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap, perilaku, dan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan terbentuk pribadi muslim yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., terbiasa melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepedulian terhadap sesama, serta mampu menjalankan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pembinaan akhlak juga diarahkan untuk membentuk karakter yang jujur, amanah, disiplin, bertanggung jawab, menghormati orang lain, serta memiliki kepedulian sosial sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat (Abuddin Nata, 2005).

Dalam konteks remaja, tujuan pembinaan akhlak menjadi semakin penting karena masa remaja merupakan fase pembentukan identitas diri yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Oleh sebab itu, pembinaan akhlak diharapkan mampu menjadi benteng moral bagi remaja agar terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan perilaku sekaligus mampu menjadi generasi yang religius, berakhlak, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pembinaan akhlak dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Salah satu bentuk pembinaan yang paling efektif adalah pembiasaan, yaitu membentuk perilaku positif melalui kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, seperti membiasakan salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, mengikuti pengajian, serta melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter dan kebiasaan baik dalam diri remaja sehingga perilaku tersebut menjadi bagian dari kepribadiannya.

Selain pembiasaan, pembinaan akhlak juga dilakukan melalui keteladanan. Keteladanan merupakan metode pendidikan yang memberikan contoh nyata mengenai perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Orang tua, guru, tokoh agama, dan pemerintah nagari memiliki peran sebagai figur teladan yang akan ditiru oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan menjadi metode yang sangat efektif karena remaja cenderung belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang-orang yang dihormatinya.

Bentuk pembinaan lainnya adalah melalui nasihat, pengawasan, kegiatan sosial, dan pemberian motivasi. Nasihat diberikan untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pengawasan dilakukan oleh keluarga, sekolah, tokoh agama, maupun pemerintah nagari agar perilaku remaja tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Sementara itu, kegiatan sosial dan keagamaan, seperti gotong royong, pengajian, peringatan hari besar Islam, serta organisasi kepemudaan menjadi media yang efektif dalam

menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan semangat beribadah. Motivasi yang diberikan secara terus-menerus juga dapat meningkatkan partisipasi remaja dalam berbagai kegiatan positif yang mendukung pembentukan akhlak mulia.

Keberhasilan pembinaan akhlak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri individu maupun lingkungan sekitarnya. Menurut Abuddin Nata (2010), faktor internal meliputi keimanan, kesadaran diri, motivasi, dan kemauan untuk belajar serta memperbaiki diri. Keimanan yang kuat akan menjadi landasan utama bagi seseorang dalam membedakan perilaku yang baik dan buruk. Kesadaran diri serta motivasi yang tinggi juga akan mendorong remaja untuk senantiasa meningkatkan kualitas akhlaknya melalui berbagai kegiatan positif.

Di samping faktor internal, pembinaan akhlak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang meliputi keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, teman sebaya, media sosial, dan pemerintah. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang membentuk karakter anak melalui pola asuh dan keteladanan orang tua. Sekolah berperan memberikan pendidikan formal yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Lingkungan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah nagari juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan akhlak remaja. Sebaliknya, pengaruh negatif teman sebaya, penyalahgunaan media sosial, serta lemahnya pengawasan dapat menjadi faktor yang menghambat keberhasilan pembinaan akhlak. Oleh karena itu, pembinaan akhlak memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah nagari, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat agar mampu menghasilkan generasi muda yang berkarakter Islami.

Dalam penelitian ini, pembinaan akhlak dianalisis melalui beberapa dimensi yang menggambarkan pelaksanaan pembinaan secara menyeluruh. Dimensi pertama adalah pembiasaan, yang ditunjukkan melalui kebiasaan melaksanakan salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, mengikuti pengajian, dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan secara rutin. Dimensi kedua adalah keteladanan, yaitu adanya contoh perilaku yang diberikan oleh tokoh agama, pemerintah nagari, orang tua, maupun tokoh masyarakat sehingga menjadi panutan bagi remaja dalam kehidupan sehari-hari.

Dimensi berikutnya adalah pembinaan sosial, yang diwujudkan melalui keterlibatan remaja dalam kegiatan gotong royong, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan berbagai aktivitas yang menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah dimensi pengawasan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah nagari, tokoh agama, dan masyarakat terhadap perilaku remaja agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama. Adapun dimensi terakhir adalah motivasi, yaitu berbagai bentuk dorongan yang diberikan kepada remaja agar aktif mengikuti kegiatan keagamaan, organisasi kepemudaan, serta berbagai aktivitas positif yang dapat memperkuat pembentukan akhlak. Kelima dimensi tersebut

menjadi indikator yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan akhlak remaja dalam penelitian ini.

C. Remaja

Remaja merupakan fase perkembangan yang berada pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini ditandai dengan perubahan yang sangat pesat pada aspek biologis, psikologis, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Perubahan tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok usia yang sedang mengalami proses pembentukan identitas diri sehingga membutuhkan bimbingan, pengawasan, dan pendidikan yang berkesinambungan. Dalam perspektif pendidikan Islam, masa remaja merupakan periode yang sangat penting karena pada fase ini mulai terbentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang akan memengaruhi kehidupan seseorang pada masa dewasa.

Sarwono (2015) menjelaskan bahwa remaja merupakan individu yang berada pada masa pencarian identitas (*identity seeking*), yaitu masa ketika seseorang mulai mengenali dirinya, menentukan tujuan hidup, serta membangun hubungan sosial yang lebih luas. Pada fase ini remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk memperoleh pengakuan dari lingkungan, serta kecenderungan mencoba berbagai pengalaman baru. Kondisi tersebut menyebabkan remaja mudah menerima pengaruh dari lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, proses pendidikan dan pembinaan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan perkembangan remaja.

Hurlock (1980) menyatakan bahwa masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, dan sosial yang berlangsung secara bersamaan. Perubahan tersebut sering kali menimbulkan ketidakstabilan emosi sehingga remaja memerlukan pendampingan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar mampu berkembang secara optimal. Remaja yang memperoleh lingkungan pendidikan yang kondusif cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan diri, mengambil keputusan, serta membangun hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai bentuk penyimpangan perilaku.

Remaja memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Salah satu karakteristik yang paling menonjol adalah perkembangan fisik yang berlangsung sangat cepat sebagai akibat dari proses pubertas. Perubahan fisik tersebut diikuti oleh perkembangan psikologis yang menyebabkan remaja mulai memiliki kemampuan berpikir abstrak, mengembangkan penalaran logis, serta membentuk sistem nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak. Pada saat yang sama, perkembangan emosional remaja masih berada pada tahap yang belum stabil sehingga mereka cenderung lebih sensitif terhadap berbagai situasi yang dihadapi.

Karakteristik lain yang melekat pada masa remaja adalah meningkatnya kebutuhan akan pengakuan sosial. Remaja mulai membangun hubungan yang lebih

intens dengan teman sebaya dan berusaha memperoleh penerimaan dari kelompok sosialnya. Selain itu, remaja mulai menunjukkan kemandirian dalam mengambil keputusan meskipun kemampuan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan masih berkembang. Oleh sebab itu, keluarga, sekolah, pemerintah nagari, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan sehingga proses perkembangan tersebut berlangsung sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial.

Dalam perspektif Islam, kualitas akhlak remaja dapat dilihat melalui hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan masyarakat, serta kemampuan mengendalikan diri. Pembagian tersebut sejalan dengan konsep akhlak dalam pendidikan Islam yang memandang bahwa akhlak tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga mencakup perilaku sosial dan tanggung jawab terhadap diri sendiri (Abuddin, 2019).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Moleong, 2018) untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran Pemerintah Nagari dalam pembinaan akhlak remaja di Nagari Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* karena memiliki program pembinaan keagamaan bagi remaja yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret sampai dengan 19 April 2026.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah informan penelitian sebanyak enam orang, yang terdiri atas 1 Wali Nagari, 1 perangkat nagari, 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat, dan 2 remaja yang dipilih karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembinaan akhlak di Nagari Ampang Pulau. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Umar Sidiq, 2019). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari Wali Nagari, perangkat nagari, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan remaja, serta triangulasi teknik dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan akhlak, dan dokumentasi berupa arsip maupun foto kegiatan. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Nagari dalam Pembinaan Akhlak Remaja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Ampang Pulau memiliki peran yang cukup strategis dalam pembinaan akhlak remaja. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan secara administratif, tetapi juga melalui berbagai program pembinaan yang bertujuan membentuk karakter remaja yang religius, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Wali Nagari, perangkat nagari, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta remaja, diketahui bahwa pemerintah nagari melaksanakan pembinaan akhlak melalui empat bentuk utama, yaitu pembinaan keagamaan, pengawasan sosial, kegiatan kepemudaan, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh adat.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Pemerintah Nagari dalam pembinaan akhlak remaja dapat diklasifikasikan ke dalam tiga peran utama, yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator. Peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui penyediaan sarana, dukungan program, serta fasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan kepemudaan. Peran sebagai motivator terlihat dari upaya pemerintah nagari dalam memberikan dorongan, pembinaan, dan pembiasaan kepada remaja agar aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan menjauhi perilaku menyimpang. Sementara itu, peran sebagai koordinator diwujudkan melalui sinergi dan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, keluarga, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan akhlak remaja.

Pembinaan keagamaan menjadi program utama yang dijalankan pemerintah nagari dalam membentuk akhlak remaja. Bentuk pembinaan tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap penyelenggaraan wirid remaja, didikan subuh, pesantren Ramadan, pengajian rutin di masjid dan mushala, serta peringatan hari-hari besar Islam. Pemerintah nagari tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga menyediakan fasilitas, membantu pendanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi dengan pengurus masjid dan tokoh agama agar kegiatan keagamaan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Informan I-1 (Wali Nagari) yang menyatakan:

"Kami berusaha memberikan perhatian khusus kepada generasi muda karena mereka adalah masa depan nagari. Pembinaan akhlak harus menjadi prioritas agar remaja tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif."

Berdasarkan temuan penelitian, kegiatan keagamaan menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, meningkatkan kedisiplinan beribadah, serta memperkuat hubungan remaja dengan lingkungan masjid. Kondisi tersebut mencerminkan peran Pemerintah Nagari sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan, sarana, dan koordinasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya pembinaan akhlak remaja.

Selain pembinaan keagamaan, pemerintah nagari juga melaksanakan pengawasan sosial sebagai upaya mencegah munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Pengawasan dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah nagari, ninik mamak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan. Bentuk pengawasan yang dilakukan tidak bersifat represif, tetapi lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui pemberian nasihat, teguran, serta pendampingan kepada remaja yang mulai menunjukkan perilaku yang kurang sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini menunjukkan bahwa pembinaan akhlak remaja dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga maupun pemerintah nagari semata.

Pemerintah nagari juga berupaya membangun karakter remaja melalui berbagai kegiatan kepemudaan. Kegiatan tersebut meliputi olahraga, gotong royong, pelatihan keterampilan, serta aktivitas organisasi kepemudaan yang melibatkan remaja secara aktif. Berdasarkan hasil penelitian, penyediaan kegiatan positif tersebut bertujuan memberikan ruang bagi remaja untuk mengembangkan potensi, mempererat hubungan sosial, serta mengurangi keterlibatan mereka dalam aktivitas yang tidak bermanfaat. Kegiatan kepemudaan juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kerja sama, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga pembinaan akhlak tidak hanya dilakukan melalui ceramah keagamaan, tetapi juga melalui pengalaman sosial secara langsung (Mulianata et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari berperan sebagai motivator dengan mendorong remaja untuk mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan positif yang mendukung pembentukan akhlak dan karakter.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pembinaan akhlak remaja di Nagari Ampang Pulau tidak dapat dipisahkan dari kerja sama antara pemerintah nagari dengan tokoh agama, ninik mamak, bundo kanduang, lembaga adat, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui keterlibatan para tokoh dalam kegiatan keagamaan, musyawarah nagari, pembinaan remaja, hingga penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi remaja. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan I-3 (Tokoh Adat/Ninik Mamak):

"Pembinaan akhlak anak kemenakan bukan hanya tugas orang tua, tapi juga tugas ninik mamak dan pemerintah nagari. Kami selalu diajak bekerja sama jika ada masalah remaja."

Pernyataan tersebut didukung oleh Informan I-4 (Tokoh Agama) yang menyampaikan:

"Pemerintah nagari cukup terbuka dalam bekerja sama. Kalau ada remaja yang mulai menyimpang, biasanya kami diajak berdiskusi untuk mencari solusi."

Sinergi antarlembaga ini memperkuat pelaksanaan pembinaan akhlak karena setiap unsur masyarakat menjalankan peran sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dengan demikian, pembinaan akhlak tidak hanya dilakukan melalui pendekatan formal oleh pemerintah nagari, tetapi juga diperkuat oleh nilai-nilai adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari menjalankan perannya sebagai koordinator dengan mengintegrasikan kerja sama antara tokoh agama, tokoh adat, keluarga, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan akhlak remaja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Ampang Pulau telah menjalankan fungsi pembinaan masyarakat secara optimal melalui berbagai program yang berorientasi pada penguatan akhlak remaja. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui integrasi kegiatan keagamaan, pengawasan sosial, kegiatan kepemudaan, dan kolaborasi dengan tokoh agama serta tokoh adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah nagari tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator dalam membangun lingkungan sosial yang kondusif bagi pembentukan karakter remaja. Keberhasilan pembinaan akhlak di Nagari Ampang Pulau sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang mendukung terwujudnya generasi muda yang religius, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Remaja untuk Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Keberagamaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan akhlak remaja di Nagari Ampang Pulau dilakukan secara terencana melalui berbagai kegiatan keagamaan, pembiasaan sosial, keteladanan, pengawasan, serta penguatan nilai-nilai adat dan agama. Pelaksanaan pembinaan tersebut melibatkan pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat sebagai upaya bersama dalam meningkatkan implementasi nilai-nilai keberagamaan pada remaja.

Pembinaan keagamaan menjadi bentuk pembinaan yang paling dominan. Pemerintah nagari secara aktif mendukung penyelenggaraan wirid remaja, pengajian rutin, pesantren Ramadan, didikan subuh, dan kegiatan Maghrib mengaji yang dilaksanakan bekerja sama dengan masjid, mushala, serta lembaga pendidikan. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman agama, tetapi juga menanamkan akhlak kepada Allah Swt., orang tua, dan sesama melalui pembiasaan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, serta pemberian materi tentang adab pergaulan dan bahaya perilaku menyimpang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kedisiplinan beribadah dan memperkuat karakter religius remaja.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Informan I-4 (Tokoh Agama) yang menyatakan:

"Kegiatan wirid remaja, didikan subuh, dan pesantren Ramadan tidak hanya mengajarkan membaca Al-Qur'an, tetapi juga membiasakan remaja untuk beribadah, menghormati orang tua, dan menjaga sopan santun dalam kehidupan sehari-hari."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan agama, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan remaja.

Pelaksanaan pembinaan juga dilakukan melalui keteladanan dan pengawasan yang diberikan oleh orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat nagari. Keteladanan diwujudkan melalui pembiasaan menjalankan ibadah berjamaah, menjaga sopan santun, menghormati orang tua, dan membangun budaya saling mengingatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, pengawasan dilakukan secara persuasif melalui keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam membimbing serta mengarahkan remaja agar terhindar dari berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan I-5 (Tokoh Masyarakat) yang mengungkapkan:

"Kalau ada anak-anak yang mulai sering berkumpul sampai larut malam atau melakukan hal yang kurang baik, kami tidak langsung memarahi mereka. Biasanya kami menegur dengan baik dan mengajak orang tua serta tokoh agama untuk bersama-sama membimbing mereka."

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap remaja lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan kolaboratif dibandingkan pendekatan yang bersifat menghukum. Selain pembinaan keagamaan dan pengawasan, pemerintah nagari mengintegrasikan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ke dalam proses pembinaan akhlak. Nilai tersebut menjadi landasan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, musyawarah nagari, maupun pembinaan oleh ninik mamak dan tokoh adat.

Sebagaimana disampaikan oleh Informan I-3 (Tokoh Adat):

"Dalam adat Minangkabau, pembinaan anak kemenakan harus berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu, pemerintah nagari, ninik mamak, dan tokoh agama harus berjalan bersama agar remaja memiliki akhlak yang baik."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai adat dan agama menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pembinaan akhlak remaja di Nagari Ampang Pulaui. Sinergi antara adat dan agama memperkuat proses internalisasi nilai-nilai moral sehingga remaja tidak hanya memahami ajaran Islam secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan budaya lokal masyarakat Minangkabau.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap implementasi nilai-nilai keberagamaan pada remaja. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi peningkatan partisipasi remaja dalam kegiatan masjid, meningkatnya kedisiplinan menjalankan ibadah, tumbuhnya sikap sopan santun terhadap orang tua dan masyarakat, serta meningkatnya keterlibatan remaja dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Di sisi lain, perilaku menyimpang, seperti berkumpul hingga larut malam dan aktivitas yang kurang produktif, mulai berkurang seiring meningkatnya keterlibatan remaja dalam berbagai program pembinaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan akhlak remaja di Nagari Ampang Pulai dilaksanakan melalui sinergi antara kegiatan keagamaan, pembiasaan ibadah, keteladanan, pengawasan sosial, serta penguatan nilai-nilai adat dan agama. Pelaksanaan pembinaan tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya implementasi nilai-nilai keberagamaan dalam kehidupan remaja, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran beribadah, kepedulian sosial, sikap menghormati orang tua, serta terbentuknya perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan akhlak yang dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan menjadi strategi yang efektif dalam membentuk generasi muda yang religius dan berakhlak mulia.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Nagari dalam Pembinaan Akhlak Remaja

Keberhasilan pelaksanaan pembinaan akhlak remaja di Nagari Ampang Pulai dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut menentukan efektivitas program pembinaan yang dilaksanakan pemerintah nagari bersama tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat.

Faktor pendukung utama berasal dari kuatnya dukungan tokoh agama dan tokoh adat dalam pembinaan remaja. Tokoh agama berperan aktif memberikan bimbingan melalui ceramah, pengajian, dan pembinaan di masjid, sedangkan ninik mamak dan tokoh adat menanamkan nilai-nilai moral berdasarkan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Keterlibatan kedua unsur tersebut memperkuat proses internalisasi nilai-nilai agama dan adat sehingga pembinaan akhlak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah nagari, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Informan I-3 (Tokoh Adat) yang menyatakan:

"Pembinaan akhlak remaja tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah nagari. Ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan masyarakat harus ikut membimbing anak kemenakan agar tetap berpegang pada adat dan syariat Islam."

Senada dengan itu, Informan I-4 (Tokoh Agama) mengungkapkan:

"Kalau pemerintah nagari, tokoh agama, dan masyarakat saling bekerja sama, pembinaan remaja menjadi lebih mudah karena mereka mendapat bimbingan dari berbagai pihak."

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan akhlak remaja.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya sarana keagamaan yang memadai. Masjid dan mushala di Nagari Ampang Pulai dimanfaatkan sebagai pusat pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan, seperti wirid remaja, didikan subuh, pengajian rutin, dan pesantren Ramadan. Dukungan pemerintah nagari terhadap penyediaan fasilitas dan koordinasi kegiatan menjadikan sarana keagamaan berfungsi sebagai ruang pembinaan karakter sekaligus meningkatkan partisipasi remaja dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan orang tua dalam mengawasi serta mendampingi remaja turut menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pembentukan akhlak. Dukungan tersebut diperkuat oleh komitmen pemerintah nagari melalui penyusunan program pembinaan, koordinasi lintas lembaga, dan pengalokasian anggaran bagi kegiatan keagamaan maupun kepemudaan.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan akhlak remaja. Hambatan yang paling dominan berasal dari pengaruh pergaulan bebas dan lingkungan sosial yang kurang kondusif. Sebagian remaja masih lebih tertarik menghabiskan waktu bersama teman sebaya di luar rumah dibandingkan mengikuti kegiatan keagamaan, sehingga pengawasan dari pemerintah nagari dan masyarakat belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya perilaku menyimpang. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi dan media sosial yang mendorong remaja lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan telepon genggam, media sosial, dan permainan daring dibandingkan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan keagamaan.

Kondisi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Informan I-6 (Remaja):

"Banyak teman yang lebih memilih bermain handphone atau berkumpul dengan teman daripada ikut wirid atau kegiatan di masjid karena dianggap lebih menarik."

Selain itu, Informan I-1 (Wali Nagari) juga menyampaikan:

"Kami sudah membuat berbagai program pembinaan, tetapi masih ada kendala karena tidak semua orang tua mengawasi anaknya, dan anggaran nagari juga terbatas sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara rutin."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sosial, perkembangan teknologi, rendahnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembinaan akhlak remaja.

Hambatan lainnya berasal dari kurangnya keterlibatan sebagian orang tua dalam proses pembinaan akhlak. Kesibukan bekerja serta rendahnya pengawasan terhadap aktivitas anak menyebabkan pembinaan yang dilakukan di lingkungan keluarga belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pendidikan akhlak lebih banyak

dibebankan kepada sekolah, tokoh agama, atau pemerintah nagari. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan secara berkelanjutan. Meskipun pemerintah nagari memiliki komitmen yang kuat, keterbatasan dana menyebabkan beberapa program pembinaan remaja belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan rutin karena harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan lainnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan akhlak remaja di Nagari Ampang Pulai sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat. Dukungan sosial yang kuat, ketersediaan sarana keagamaan, serta komitmen pemerintah menjadi modal utama dalam mendukung keberhasilan pembinaan. Sebaliknya, pengaruh lingkungan negatif, perkembangan teknologi yang tidak terkendali, rendahnya keterlibatan sebagian orang tua, dan keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan agar pembinaan akhlak dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan implementasi nilai-nilai keberagamaan di kalangan remaja.

Peran Pemerintah Nagari dalam Pembinaan Akhlak Remaja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Ampang Pulai memiliki peran strategis dalam pembinaan akhlak remaja melalui fungsi sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator. Peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pembinaan sosial, penyediaan fasilitas pendukung, serta penguatan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah nagari tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan sosial yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter generasi muda.

Temuan tersebut sejalan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2012), yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi yang dimiliki. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah nagari mengimplementasikan perannya melalui berbagai program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan moral dan keagamaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuannya membangun kehidupan sosial yang religius dan berkarakter.

Temuan penelitian juga mendukung konsep pendidikan akhlak yang dikemukakan Ahmad Tafsir (2014), bahwa pembentukan akhlak memerlukan proses pembiasaan, keteladanan, dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah nagari terhadap kegiatan keagamaan dan kepemudaan mencerminkan penerapan konsep tersebut melalui pendekatan

partisipatif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pembinaan akhlak tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi keagamaan, tetapi juga melalui pengalaman sosial yang mendorong remaja untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemerintah desa atau pemerintahan lokal memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pembentukan karakter generasi muda. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena menunjukkan bahwa pembinaan akhlak remaja di Nagari Ampang Pulai dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa nilai adat dan agama menjadi satu kesatuan dalam membentuk karakter remaja, sehingga pemerintah nagari berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintahan dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Remaja dalam Meningkatkan Implementasi Nilai-nilai Keberagamaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan akhlak di Nagari Ampang Pulai dilakukan melalui pendekatan keagamaan, pembiasaan, keteladanan, pengawasan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Program seperti wirid remaja, didikan subuh, pesantren Ramadan, pengajian rutin, gotong royong, dan kegiatan organisasi kepemudaan menjadi media utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam kepada remaja. Pelaksanaan pembinaan tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman keagamaan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang tercermin pada meningkatnya kedisiplinan beribadah, kepedulian sosial, dan sikap menghormati orang tua maupun masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Zakiah Daradjat (2005) yang menyatakan bahwa pembinaan akhlak harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan agama yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, pembinaan tidak hanya berlangsung melalui ceramah keagamaan, tetapi juga melalui pembiasaan dalam berbagai aktivitas sosial dan keagamaan sehingga nilai-nilai Islam lebih mudah diinternalisasikan oleh remaja.

Temuan ini juga memperkuat teori Abdullah Nashih Ulwan (2007), yang menegaskan bahwa pembentukan akhlak memerlukan lingkungan pendidikan yang kondusif serta keteladanan dari keluarga, masyarakat, dan pemimpin. Keterlibatan pemerintah nagari bersama tokoh agama, keluarga, dan masyarakat menunjukkan bahwa pembinaan akhlak menjadi tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi seluruh unsur masyarakat.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pembinaan akhlak pada lingkungan keluarga dan sekolah, penelitian ini

menunjukkan bahwa pemerintah nagari mampu menjadi aktor yang mengintegrasikan berbagai bentuk pembinaan melalui kebijakan, program sosial, dan penguatan budaya lokal. Dengan demikian, pembinaan akhlak tidak hanya berlangsung pada lingkungan pendidikan formal, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sosial berbasis masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembinaan Akhlak Remaja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan akhlak remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan tokoh agama dan tokoh adat, ketersediaan sarana keagamaan, partisipasi masyarakat dan keluarga, serta komitmen pemerintah nagari dalam menyelenggarakan program pembinaan. Faktor-faktor tersebut membentuk lingkungan sosial yang mendukung internalisasi nilai-nilai agama dan memperkuat pelaksanaan pembinaan akhlak secara berkelanjutan.

Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Hasbullah (2013), yang menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi antara pemerintah nagari, tokoh agama, lembaga adat, dan masyarakat menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi pembentukan karakter remaja.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat, yaitu pengaruh media sosial, pergaulan negatif, rendahnya partisipasi sebagian remaja dalam kegiatan keagamaan, kurangnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan anggaran pembinaan. Perkembangan teknologi digital memberikan tantangan baru karena remaja lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dibandingkan mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan pemerintah nagari.

Temuan ini mendukung teori kontrol sosial Abdullah Nashih Ulwan (2007), yang menegaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kekuatan pengawasan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial. Semakin kuat pengawasan sosial yang diberikan, semakin besar peluang terbentuknya perilaku yang sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya pengawasan akan meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan perilaku.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan akhlak remaja tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah nagari, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi antara pemerintah, keluarga, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi strategi yang diperlukan agar pembinaan akhlak dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan sosial di era digital.

5. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Ampang Pulai memiliki peran strategis dalam pembinaan akhlak remaja melalui fungsi sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan dukungan

terhadap kegiatan keagamaan, pelaksanaan pengawasan sosial, penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, serta koordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut memperkuat pelaksanaan pembinaan akhlak remaja secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembinaan akhlak dilakukan melalui pembinaan keagamaan, pembiasaan ibadah, keteladanan, pengawasan sosial, serta penguatan nilai-nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Implementasi berbagai program tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran beribadah, partisipasi remaja dalam kegiatan keagamaan, sikap menghormati orang tua, kepedulian sosial, serta terbentuknya perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan pembinaan akhlak remaja didukung oleh kolaborasi antara pemerintah nagari, tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat, serta didukung oleh ketersediaan sarana keagamaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan, rendahnya keterlibatan sebagian orang tua, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dan keberlanjutan program pembinaan diperlukan agar implementasi nilai-nilai keberagamaan pada remaja dapat terus ditingkatkan.

6. Referensi

- Abuddin, N. (2019). *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. RajaGrafindo Persada.
- Afroo, F. A., Nurjanah, & Yudita, A. (2025). Pendidikan Akhlak Islami sebagai Strategi Preventif Cyberbullying pada Remaja Muslim. *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3), 429–446.
- Aliefiarahma, S. M., & Sasmita, J. (2025). Nilai-Nilai Syariah dalam Kepemimpinan untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Amanah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 432–441.
- Budiman, M., Sudrajat, A., Yulianti, D. A. R., & Agustinova, D. E. (2026). Transformasi Nilai Budaya Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah " Dalam Perkembangan Media Populer. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 8(2), 272–279.
- Haliza, N., Mulyana, A., & Suriansah. (2026). Kepemimpinan Dalam Persepektif Islam. *Jurnal Pelita Studi Islam Dan Humaniora*, 2(1), 89–101.
- Hidayat, D. N., Fahrurrozi, & Ekawati. (2025). Akhlak Dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan dan Bernegara Menurut Ibnu Miskawaih dan Imam Mawardi. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(4), 202–214.
- Mariana, M., Sibawaihi, & Anna, D. N. (2024). Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 5(2).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulianata, S., Iru, L., & Syahrir, A. (2025). Peran Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Terjadinya Perilaku Menyimpang Pada Remaja di Desa Madodo Kabupaten Muna. *Mores: Jurnal Pendidikan, Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 70–76.
- Ridwan, M. (2022). Pola Pembinaan Perilaku Remaja Dalam Meningkatkan Akhlak.

Al-Miskawaih: Journal of Science Education, 1(2), 359–376.

Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2023). Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 145–163.

Umar Sidiq, M. M. C. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.pdf)

Yusmardi, E., Fauzi, I., Susanti, R., & Hendra, F. (2026). Peran Keluarga dan Pesantren dalam Menanamkan Akhlak di Era Teknologi. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v7i1.22664>